

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menghadapi perubahan menuju masyarakat baru dalam era pelaksanaan otonomi daerah, dunia pendidikan juga dituntut memiliki konsep dan pendekatan yang sesuai. Strategi untuk menghadapi perubahan tersebut, pendidikan mempunyai peran yang amat penting, karena pendidikan menurut Soebagio Atmodiwirio (2000 : 31) sekurang-kurangnya memiliki empat fungsi antara lain: (1) fungsi sosial, memerangi segala keterbelakangan dan kebodohan; (2) fungsi pembaharuan dan inovasi, meningkatkan kehidupan dan martabat manusia; (3) fungsi pengembangan sosial dan kebudayaan, meningkatkan ketahanan nasional dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan berdasarkan kebudayaan bangsa; (4) fungsi seleksi, mengembangkan kemampuan manusia Indonesia.

Di sisi lain, Soepardjo (1988 : 18 – 19) berpendapat bahwa : “proses pendidikan bukan sekedar hanya proses mekanis, tetapi sebuah transformasi nilai, pendidikan juga merupakan pengintegrasian nilai dalam wadah budaya bangsa, yang akan menghasilkan suatu kegiatan yang efektif dan fungsional dan tanpa nilai seni budaya bangsa, maka usaha pendidikan akan merupakan kegiatan yang kurang bermisi serta kehilangan arah, makna, dan arti”.

Sedangkan menurut Wardiman Djojonegoro (1996), pendidikan paling kurang memiliki tiga fungsi, yaitu (1) mencerdaskan seluruh rakyat, (2) menyiapkan

tenaga kerja , (3) membina dan mengembangkan IPTEK dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Dari pengertian di atas, menjelaskan bahwa pendidikan bagi suatu bangsa pada situasi apa pun amatlah penting, terlebih penting pada saat sedang terjadi perubahan yang mendasar dan cepat, sebagai konsekuensi logis dari reformasi dan otonomi daerah yang berlaku efektif mulai Januari 2001. Maka jelaslah kalau pendidikan harus tetap eksis, dan tampil seirama dengan nuansa kehidupan masyarakat bangsa yang sedang menata diri melalui reformasi untuk menuju kehidupan yang lebih meningkatnya akses masyarakat dalam berperanserta di banyak aspek kehidupan.

Pendidikan, menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 (UU No. 2 Th 1989) merupakan suatu sistem yaitu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan, sedangkan jalur pendidikan di luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. Namun inti dari pendidikan adalah proses belajar (*learning process*), artinya pendidikan yang efektif berarti pula

proses belajar yang efektif. Artinya, bahwa semua instrumen pembelajaran berinteraksi secara optimal untuk menuju tercapainya tujuan pendidikan.

Dalam hal fungsi sekolah yang efektif, Cheng (1996) mengemukakan bahwa "sekolah itu menunjukkan kemampuannya dalam menjalankan fungsinya secara maksimal. Adapun fungsi sekolah termaksud meliputi : (1) fungsi ekonomis, (2) fungsi sosial kemanusiaan, (3) fungsi politis, (4) fungsi budaya, dan (5) fungsi pendidikan. Fungsi ekonomis sekolah, adalah memberikan bekal kepada siswa agar bisa hidup sejahtera. Fungsi sosial sekolah adalah, sebagai media bagi siswa untuk beradaptasi dengan kehidupan masyarakat. Fungsi politis sekolah sebagai wahana untuk memperoleh pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Fungsi budaya adalah sebagai media untuk melakukan transmisi dan transformasi budaya. Adapun fungsi pendidikan, sekolah sebagai wahana untuk proses pendewasaan dan pembentukan kepribadian siswa.

Sekolah merupakan sebagian dari sistem masyarakat dan berada di bawah pengaruh masyarakat. Sekolah juga sebagai pranata sosial, merupakan suatu sistem terbuka "*A school is an open system to degree that it interacts with its environment and the larger systems of which it is part*" (Tye and Novotny, dalam Manap, 1999 : 24).

Sekolah sebagai bagian dari masyarakat mempunyai fungsi menerima dan membantu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat seperti disebutkan di atas hakekatnya terus menerus berubah dan berkembang. Oleh karena itu pengelolaan pendidikan sekolah menjadi amat rumit dan unik, terlebih dihadapkan pada semakin

terbatasnya sumber-sumber pendukung terutama khususnya biaya dari pemerintah yang amat diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan yang memadai. Konsekuensi logisnya administrator pendidikan selaku perencana pendidikan harus berusaha keras mempelajari teori-teori, menerapkan konsep-konsep, prinsip-prinsip perencanaan yang jitu (Siswoyo Hardjodipuro, 1975 : 7).

Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) merupakan satuan pendidikan dasar yang cukup strategis, baik dilihat dari segi kelompok umur sesuai dengan kajian perkembangan psikologis maupun dikaitkan dengan keberhasilan proses belajar selanjutnya. Menurut Sanusi (1998) pada usia 7-15 tahun adalah paling baik dibangun nilai-nilai dasar kepribadian positif, karena pada usia itu tengah berkembang subur sensitivitas. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa keberhasilan pendidikan seseorang pada tahap selanjutnya, amat ditentukan oleh pengalairan pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar.

Untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah pada situasi apapun, pada situasi krisis ekonomi sekalipun, tidak akan bisa lepas dari masalah biaya pendidikan. Persoalan ini akan menjadi semakin rumit manakala dikaitkan dengan variabel-variabel biaya.

Di satu pihak kebutuhan biaya semakin meningkat sejalan dengan perkembangan pendidikan, sedangkan di lain pihak biaya yang tersedia relatif terbatas. Bahkan dua tahun terakhir sumber dana pendidikan dari pemerintah cenderung menurun dari tahun sebelumnya. Sedangkan peran biaya pendidikan dalam konteks penyelenggaraan pendidikan amat erat hubungannya dengan

mutunya. Hal ini sebagaimana dikemukakan Beeby, yang dikutip oleh Tilaar sebagai berikut : “salah satu kunci utama dalam meningkatkan pendidikan adalah tersedianya cukup biaya. Pendidikan yang baik menuntut biaya yang lebih besar dari pendidikan yang buruk “ (Tilaar, 1970 : 51).

Gambaran empirik tentang pentingnya kecukupan biaya pendidikan dan semakin terbatasnya biaya pendidikan dari pemerintah mendorong perlunya dikembangkan berbagai upaya manajemen yang dilakukan oleh para peneliti, termasuk administrator pendidikan, agar diperoleh biaya pendidikan dari berbagai pihak untuk membiayai pendidikan sehingga pendidikan di sekolah berjalan efektif. (Ace Suryadi dan Tilaar, 1993 : 22)

Penelitian termaksud antara lain tentang upaya menggali sumber biaya pendidikan agar layanan pendidikan efektif dan faktor-faktor yang menjadi hambatan pencapaian sekolah efektif perlu dicarikan pemecahannya. Oleh karena itu masalah ini adalah aktual untuk diteliti dan dianalisis, terlebih apabila dikaitkan dengan rencana disosialisasikannya manajemen berbasis sekolah (MBS). Konsep MBS menekankan keterlibatan tinggi (*high involvement model*) yaitu lebih berorientasi pada kemampuan yang memungkinkan keterlibatan orang tua/masyarakat secara bermakna dan mempertaruhkan kinerjanya sendiri, di samping perlu dikembangkan *power sharing* antara pemerintah pusat, daerah dan pengelola sekolah (Nanang Fattah, 2000)

Uraian di atas memberi gambaran betapa pentingnya studi mengenai upaya menggali sumber biaya pendidikan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan

yang efektif, meski dalam situasi krisis dan kemampuan pemerintah amat terbatas. Masalah ini amat menarik dan pelaksanaa studi yang dilakukan ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- (1) Alokasi biaya pendidikan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) memperlihatkan jauh dari kecukupan, yakni masih di bawah 10% dari GNP, sedangkan para pakar berpendapat biaya pendidikan yang memadai mestinya berkisar 20 – 25 dari GNP;
- (2) Usia sekolah 7-15 tahun masih merupakan bagian terbesar kelompok umur yakni sekitar 45 juta jiwa;
- (3) Penyelenggaraan pendidikan yang baik seyogyanya diimbangi dengan tersedianya biaya yang cukup memadai;
- (4) Dalam pendidikan nasional sesuai dengan Undang-undang No. 39 Th 1992, bahwa “peranserta masyarakat ikut memelihara, menumbuhkan dan mengembangkan pendidikan nasional”;
- (5) Secara teknis, peranserta masyarakat tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk dukungan anggaran terhadap pembiayaan pendidikan, sehingga proses pendidikan tersebut mempunyai dukungan anggaran yang cukup untuk dipelihara, ditumbuhkan, dan dikembangkan.

Berdasarkan data pada 10 SLTP Negeri di Wilayah Bandung Barat diperoleh data perbandingan anggaran pemerintah (APBN) dengan anggaran bantuan masyarakat (BP3), yang dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 1 : Program Kerja dan Anggaran Biaya Sekolah Tahun Pelajaran 2000/2001

No	SLTP	SUMBER ANGGARAN			JUMLAH
		RUTIN	OPF	BP3	
1	SLTPN 1	404.441.000	800.000	233.000.000	404.474.000
2	SLTPN 6	283.611.000	1.200.000	185.454.000	470.265.000
3	SLTPN 9	365.843.000	1.200.000	222.408.000	589.451.000
4	SLTPN 12	435.051.000	1.200.000	233.664.000	669.895.000
5	SLTPN 15	283.000.000	800.000	116.100.000	399.900.000
6	SLTPN 23	276.014.000	-	177.600.000	453.614.000
7	SLTPN 25	287.755.000	800.000	204.708.000	529.263.000
8	SLTPN 26	278.785.000	-	149.560.000	428.675.000
9	SLTPN 29	415.000.000	-	124.755.000	539.755.000
10	SLTPN 32	280.466.000	-	167.574.000	448.040.000
JUMLAH		3.209.500.000	6.000.000	1.812.823.000	4.933.332.000

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2000

Tabel di atas menggambarkan kontribusi masyarakat yang direpresentasikan dalam BP3 hanya menyumbang sebesar Rp 1.812.823.000 atau sebanyak 36 % terhadap keseluruhan biaya pendidikan sebesar Rp 4.933.332.000. Dengan demikian peranan masyarakat untuk membantu pembiayaan pendidikan di sekolah relatif masih kurang memadai, terlebih ketika anggaran yang bersumber dari APBN dinilai sangat minim dipandang dari prinsip otonomi dalam kerangka MBS. Sebagai dampak lebih lanjut, baik menyangkut kualitas proses maupun hasil belajar masih belum memuaskan sepenuhnya. Dari sejumlah indikator kualitas, salah satu di antaranya sebaran hasil EBTANAS di sepuluh SLTP Negeri Bandung Barat, baru menduduki puluhan atau belasan untuk tingkat rayon Kota Bandung. Sedangkan peringkat pertama untuk seluruh mata pelajaran tersebut dipegang oleh SLTPK I BPK Penabur yang seluruh kegiatan belajar mengajarnya didukung dengan biaya yang sangat memadai.

Oleh karena itu kiranya diperlukan adanya penelitian tentang upaya memberdayakan peranserta masyarakat dalam membiayai pendidikan di sekolah, khususnya di SLTPN (melalui sudut pandang administrasi pendidikan) dengan harapan biaya yang diperlukan akan dapat diperoleh secara cukup memadai sehingga lebih mampu menunjang efektivitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk menelitinya lebih jauh ke dalam bentuk tesis dengan judul : **“HUBUNGAN PEMBERDAYAAN DAN PERANSERTA MASYARAKAT DENGAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH (Suatu Studi Deskriptif Analitik pada SLTP Negeri di Kota Bandung)”**.

B. Rumusan masalah

Salah satu kunci utama dalam meningkatkan pendidikan adalah tersedianya anggaran yang memadai. Seperti halnya pendapat Tilaar (1970) bahwa pendidikan yang baik menuntut biaya yang lebih besar dari pendidikan yang buruk. Sementara itu anggaran yang disediakan pemerintah dalam bentuk APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dinilai masih belum memadai. Untuk itu diperlukan berbagai upaya untuk mendayagunakan peranserta masyarakat sehingga mereka mampu memberikan kontribusi dalam bentuk dukungan anggaran bagi penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sejauh ini peranan masyarakat yang

direpresentasikan dalam BP3 juga dinilai masih belum memadai. Oleh karena itu diperlukan berbagai langkah strategis untuk menggali potensi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kontribusinya dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Salah satu upaya ke arah itu adalah melalui pemberdayaan. Melalui pemberdayaan ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya dari aspek pembiayaan. Upaya ini sekurang-kurangnya telah diwujudkan dalam program orang tua asuh dan donatur pendidikan di beberapa sekolah. Tetapi *apakah pemberdayaan dan peranserta masyarakat ini secara signifikan dapat membantu pembiayaan pendidikan di sekolah*, adalah suatu pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini.

Bertitik tolak dari rumusan masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitian tesis ini dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Adakah hubungan yang signifikan antara pemberdayaan dengan pembiayaan pendidikan di sekolah?
- (2) Sejauhmana hubungan pemberdayaan dengan peranserta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di sekolah?
- (3) Seberapa jauh hubungan peranserta masyarakat dengan pembiayaan pendidikan di Sekolah?
- (4) Bagaimana hubungan secara bersama-sama antara pemberdayaan dan peranserta masyarakat dengan pembiayaan pendidikan di sekolah?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pemanfaatan peranserta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di sekolah pada lingkup pelaksanaan manajemen di sekolah, untuk pengembangan program pendidikan di sekolah pada saat dana pendidikan dari pemerintah amat terbatas, melalui indentifikasi, deskripsi, dan analisis pola pembiayaan, pola manajemen sumber dana, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya .

Secara khusus penelitian ini bertujuan :

- (1) Menguji hubungan antara pemberdayaan dengan pembiayaan pendidikan di sekolah;
- (2) Memperoleh gambaran tentang hubungan pemberdayaan dengan peranserta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di sekolah;
- (3) Mengkaji hubungan peranserta masyarakat dengan pembiayaan pendidikan di sekolah;
- (4) Mengidentifikasi hubungan secara bersama-sama antara pemberdayaan dan peranserta masyarakat dengan pembiayaan pendidikan di sekolah.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah kajian alternatif mengenai pola penyelenggaraan manajemen pendidikan yang dikembangkan berdasarkan acuan teori administrasi kontemporer dengan fokus kajian manajemen pembiayaan

pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), melalui pemberdayaan peran serta masyarakat.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bahan bacaan dalam upaya pemerataan dan perluasan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan dasar.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijaksanaan pemerataan dan perluasan dan peningkatan mutu pendidikan dasar, khususnya SLTP.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir penelitian (paradigma penelitian) merupakan suatu model yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitiannya.

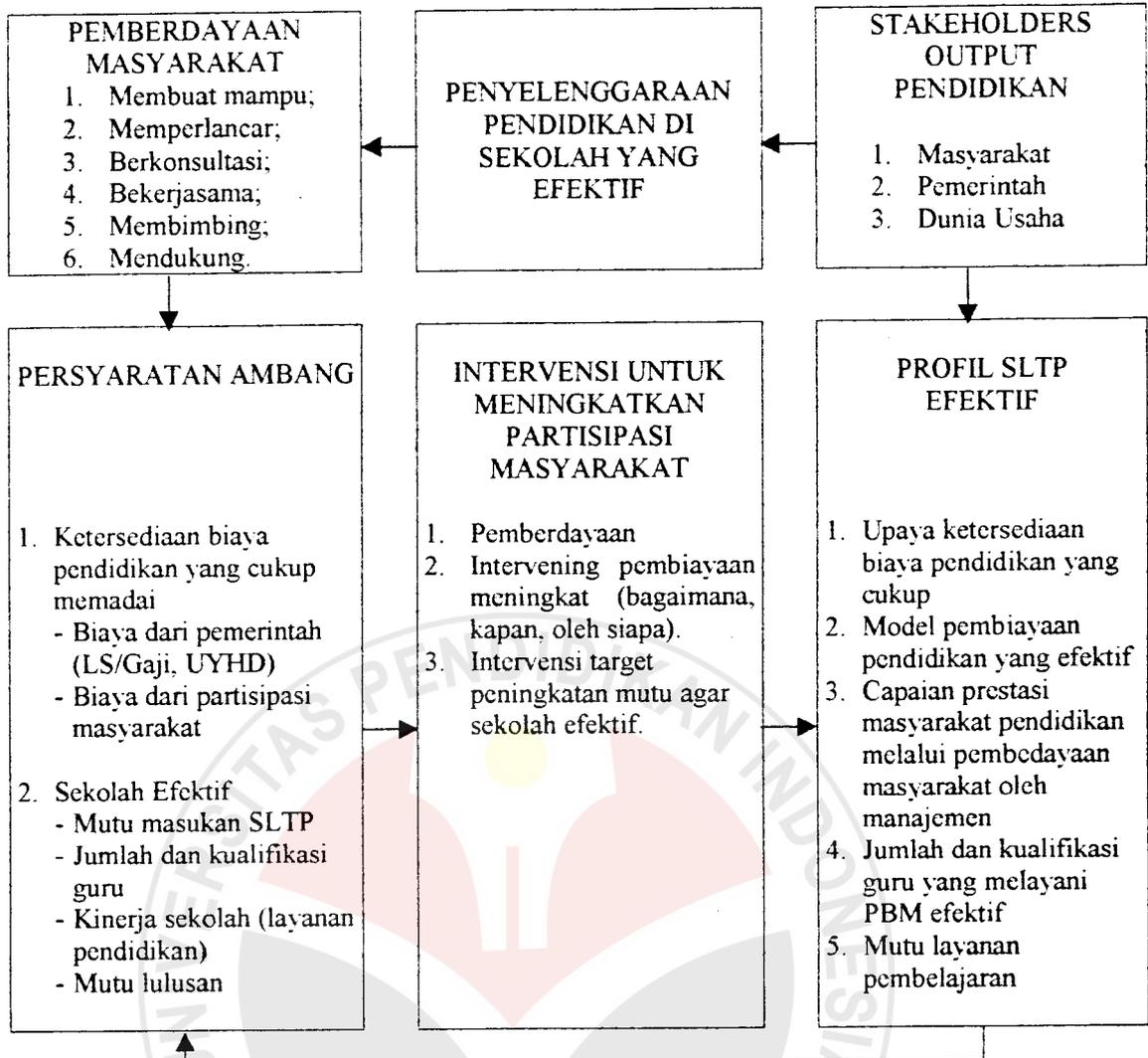
Kerangka berpikir tentang implementasi administrasi pendidikan dan hubungannya dalam pemberdayaan peranserta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di sekolah dalam rangka menyukseskan program pemerataan mutu pendidikan, yang didisusun berdasarkan asumsi-asumsi dan gambaran fenomena sebagaimana dikemukakan pada latar belakang.

Kerangka berpikir penelitian ini dikembangkan dari beberapa pemikiran teoritik antara lain :

(1) Pendidikan adalah lembaga sosial, memiliki hubungan interdependensi dengan lembaga lainnya. Perubahan yang terjadi pada suatu elemen akan berpengaruh

terhadap elemen lain. Pola-pola interaksi yang menjadi parameter sosiologi pendidikan adalah : (a) interaksi guru-murid, (b) dinamika kelompok, (c) sistem-sistem masyarakat, dan (d) struktur dan fungsi sistem pendidikan; (2) pendidikan adalah lembaga yang paling tepat untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas; (3) kajian kebijaksanaan pendidikan sekolah yang efektif adalah upaya dan capaian target pengelolaan pendidikan, baik aspek proses yang meliputi berfungsinya perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Sedangkan aspek mutu, jumlah dan mutu lulusan jumlah dan kualitas guru, jumlah dan kondisi fasilitas, frekuensi dan mutu layanan; (4) keterbatasan sumber daya biaya pendidikan dari pemerintah dapat ditanggulangi dengan dukungan biaya pendidikan dari masyarakat, karena administrasi sebagai proses sosial dimana antara individu dan organisasi saling mengisi dalam berbagai mekanisme, termasuk meningkatkan akses masyarakat melalui pemberdayaan.

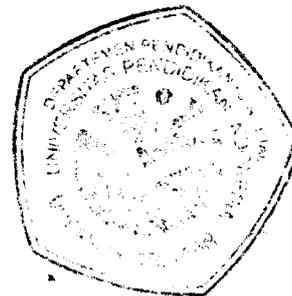
Adapun deviasi antara persyaratan ambang dengan profil SLTP yang efektif sebagai implementasi perencanaan yang memerlukan intervensi ke masyarakat agar partisipasi dalam membiayai pendidikan sekolah meningkat sehingga capaian mutu atau layanan pendidikan juga meningkat. Bentuk intervensi tersebut antara lain diimplementasikan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat (*empowering people*), sehingga masyarakat mempunyai akses terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Lebih jelasnya kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan pada gambar 1 di halaman berikut.



Gambar 1 : Kerangka Pemikiran

1. Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan mempunyai dimensi yang sangat luas, dan sangat bergantung kepada latar belakang ahli yang mendefinisikan. Misalnya Sunyoto Usman (1998:21) menilai istilah pemberdayaan berkaitan dengan penanganan



masalah kemiskinan. Menurut Sunyoto Usman, setidaknya ada dua macam perspektif yang relevan untuk mendekati persoalan pemberdayaan masyarakat (terutama kelompok miskin) agar lebih memiliki akses pada pelayanan kesehatan, yaitu (1) perspektif yang memfokuskan perhatiannya pada alokasi sumberdaya, dan (2) perspektif yang memfokuskan perhatiannya pada penampilan kelembagaan.

Pernyataan yang sama, juga dikemukakan Ginandjar Kartasasmita. Dalam konteks yang lebih luas, Ginandjar Kartasasmita (1996) mengemukakan bahwa keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakang ...

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *people centered, participatory, empowering, and substansiable*. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya menggali potensi baik yang bersifat individu maupun kolektif, untuk dikembangkan sehingga menghasilkan sesuatu yang berguna bagi mereka.

Dalam konteks manajemen Aileen Mitchell Stewart (1998 : 22) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah “merupakan cara yang amat praktis dan produktif untuk mendapatkan yang terbaik dari diri kita sendiri dan dari staf kita”. Definisi ini lebih cocok bila dikaitkan dengan kajian penelitian ini, dalam arti

menggali potensi sumberdaya kemampuan dan finansial masyarakat secara praktis dan produktif untuk membantu pembiayaan pendidikan di sekolah. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan berkaitan erat dengan fungsi-fungsi seorang manajer. Untuk itu Aileen Mitchel Stewart (1998) mempersyaratkan kecakapan khusus untuk melakukan pemberdayaan masyarakat (*empowering people*), yaitu

- (1) Membuat mampu (*enabling*);
- (2) Memperlancar (*facilitating*);
- (3) Berkonsultasi (*consulting*);
- (4) Bekerjasama (*collaborating*);
- (5) Membimbing (*mentoring*);
- (6) Mendukung (*supporting*).

Kecakapan-kecakapan yang diperlukan dalam pemberdayaan ini identik dengan fungsi-fungsi manajemen sebagaimana dikemukakan para ahli. Namun dalam kecakapan-kecakapan ini terdapat penekanan secara khusus, sehingga semua kegiatan manajer diorientasikan pada upaya menggali potensi individu atau kelompok yang diberdayakan.

2. Peranserta Masyarakat

Pengertian peran dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (WJS Poerwadarminta, 1987 : 735) adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (terjadinya sesuatu hal atau peristiwa). Dengan demikian peran dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan. Karena keterlibatannya itulah, maka seseorang tersebut dituntut mampu berbuat banyak dan sekaligus rela berkorban untuk menunjang kegiatan yang diikutinya.

Dalam konteks yang lebih luas, peranserta identik dengan partisipasi. Loekman Soetrisno (1995 : 206), partisipasi adalah “bersedia dengan sukarela mau berkorban untuk menunjang tercapainya tujuan....” Misalnya partisipasi rakyat untuk pembangunan merupakan sesuatu yang harus diwujudkan jika menghendaki peningkatan kesejahteraannya. Dalam hubungannya dengan pembangunan nasional, Loekman Soetrisno mengemukakan bahwa definisi partisipasi yang berlaku di lingkungan aparat perencana dan pelaksana pembangunan adalah “kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah”.

Namun sejalan dengan definisi tersebut, Loekman Soetrisno menyimpulkan :

- (1) Partisipasi bukanlah mobilisasi, melainkan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah, dalam merencanakan, melaksanakan, dan membiayai pembangunan.
- (2) Pengembangan dan pelembagaan partisipasi rakyat dalam pembangunan harus diciptakan suatu perubahan dalam persepsi pemerintah dalam pembangunan. Pembangunan harus dianggap sebagai suatu kewajiban moral dari seluruh bangsa ini dan bukan suatu ideologi baru yang harus diamankan.
- (3) Untuk membangkitkan partisipasi rakyat dalam pembangunan diperlukan sikap toleransi dari aparat pemerintah terhadap kritik, pikiran alternatif yang muncul dalam masyarakat.

3. Pembiayaan Sekolah

Sekolah merupakan sebagian dari sistem masyarakat dan berada di bawah pengaruh masyarakat. Sekolah juga sebagai pranata sosial, merupakan suatu sistem

terbuka. Sebagai konsekuensinya sekolah menerima perubahan-perubahan atas dasar intervensi dari masyarakat. Kondisi ini akan semakin aktual, apabila dikaitkan dengan rencana disosialisasikannya manajemen berbasis sekolah (MBS). Konsep MBS, menurut Nanang Fatah (2000) menekankan keterlibatan tinggi (*high involvement model*) yaitu lebih berorientasi pada kemampuan yang memungkinkan keterlibatan orang tua / masyarakat secara bermakna dan mempertaruhkan kinerjanya sendiri, di samping perlu dikembangkan *power sharing* antara pemerintah pusat, daerah dan pengelola sekolah.

Sekolah sebagai sistem sosial merupakan suatu sistem yang sangat kompleks. Keterkaitan antara proses pendidikan dengan lingkungannya akan selalu terus-menerus berlangsung. Studi biaya pendidikan sebagai salah satu kajian dalam proses produksi pendidikan tidak terlepas dari keterkaitannya dengan lingkungan. Proses pendidikan akan melihat konsep biaya dari sejumlah pengeluaran yang memang harus dikeluarkan oleh badan pendidikan sebagai biaya pendidikan dan besar kecilnya akan dipengaruhi oleh lingkungan, seperti pendapatan negara, kepadatan penduduk, dan *political will* pembuat kebijakan. Dari sudut konsumen pendidikan, konsep biaya dipandang sebagai suatu pengeluaran keluarga untuk membiayai sekolah anak, yang kemampuannya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan suatu keluarga.

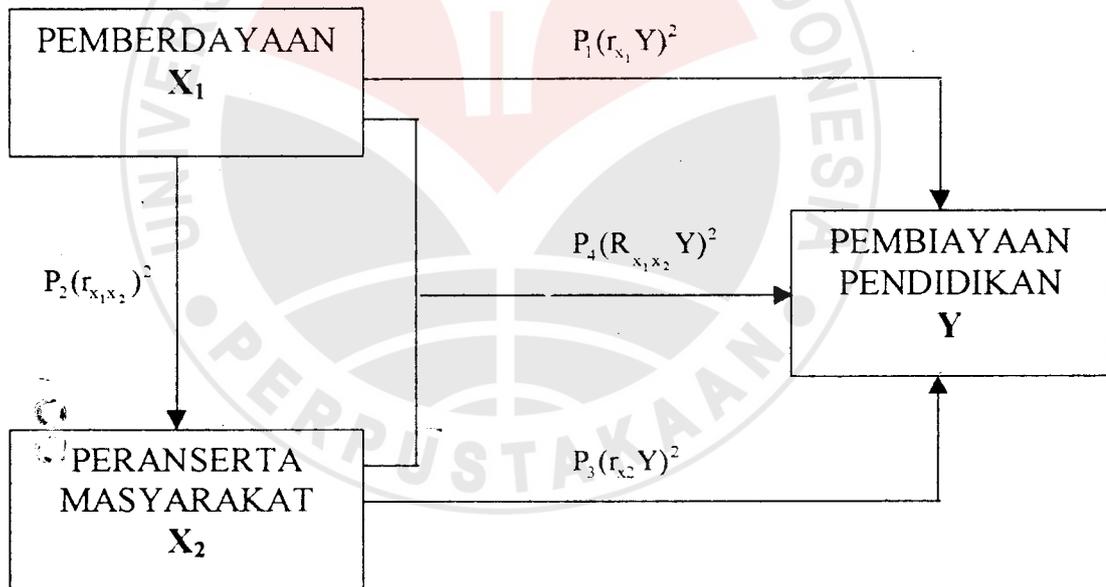
Menurut Koonts (Nanang Fatah, 2000 : 68) penganggaran (*budgeting*) merupakan satu langkah perencanaan dan juga sebagai instrumen perencanaan yang fundamental. Anggaran dapat diartikan sebagai satu rencana operasi dari suatu

Kegiatan atau proyek yang mengandung perincian pengeluaran biaya untuk suatu periode tertentu.

Persoalan penting dalam penganggaran adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber secara efisien. Itulah sebabnya, menurut Nanang Fatah (2000), penganggaran memerlukan proses yang bertahap, yaitu :

- (1) Mengidentifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode anggaran;
- (2) Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, mesin, dan material;
- (3) Sumber-sumber dinyatakan dalam bentuk uang, sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial;
- (4) Memformulasikan anggaran menurut format yang telah disepakati;
- (5) Usaha memperoleh persetujuan dari yang berwenang (pengambilan keputusan) dalam tahap ini dilakukan kompromi melalui rapat-rapat untuk mempertimbangkan secara obyektif dan subyektif.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka disusun kerangka pemikiran statistik, yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2 : Kerangka Pemikiran Statistik

Pemberdayaan sebagai suatu konsep manajemen yang dijalankan lembaga pendidikan merupakan suatu upaya untuk mendayagunakan seluruh potensi pendidikan yang dalam hal ini adalah peranserta masyarakat. Hal ini berarti bahwa lahirnya peranserta masyarakat dalam pendidikan di sekolah merupakan respon dari upaya pemberdayaan manajemen pendidikan. Proses pemberdayaan itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah yang efektif yang dalam hal ini mendapat dukungan pembiayaan yang optimal dari masyarakat. Sedangkan dukungan pembiayaan pendidikan di sekolah tersebut antara lain terwujud dari adanya peranserta masyarakat.

F. Hipotesis

Bertitik tolak dari kerangka berpikir sebagaimana dikemukakan di atas, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

- (1) Terdapat hubungan positif dan signifikan antara pemberdayaan dengan pembiayaan pendidikan di sekolah;
- (2) Terdapat hubungan positif dan signifikan antara pemberdayaan dengan peranserta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di sekolah;
- (3) Terdapat hubungan positif dan signifikan antara peranserta masyarakat dengan pembiayaan pendidikan di sekolah;
- (4) Secara bersama-sama terdapat hubungan positif dan signifikan antara pemberdayaan dan peranserta masyarakat dengan pembiayaan pendidikan di sekolah.

G. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini terdiri atas tiga variabel yang dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. **Pemberdayaan masyarakat**, yaitu suatu upaya menggali dan mengembangkan potensi masyarakat secara praktis dan produktif untuk membantu pembiayaan pendidikan di sekolah, dengan indikatornya :
 - a. Membuat mampu (*enabling*), yang diukur dengan :
 - (1) Menggali potensi diri sendiri;
 - (2) Mengetahui kemampuan diri sendiri;
 - (3) Menyediakan waktu untuk membantu pendidikan;
 - (4) Menyediakan personil pendukung.
 - b. Memperlancar (*facilitating*), yang diukur dengan :
 - (1) Mempermudah aturan organisasi;
 - (2) Mempersingkat prosedur;
 - (3) Mempermudah memperoleh informasi.
 - c. Berkonsultasi (*consulting*), yang diukur dengan :
 - (1) Membahas masalah teknis sehari-hari;
 - (2) Membahas masalah-masalah strategis;
 - (3) Meningkatkan intensitas dialog.
 - d. Bekerjasama (*collaborating*), yang diukur dengan :
 - (1) Bekerjasama penuh sepanjang berkaitan dengan pendidikan;

- (2) Menyediakan waku untuk kerjasama yang berkaitan dengan pendidikan;
- (3) Keterbukaan.
- e. Membimbing (*mentoring*), yang diukur dengan :
 - (1) Memberikan keteladanan;
 - (2) Melatih yang berkaitan dengan teknis manajemen pendidikan.
- f. Mendukung (*supporting*), yang diukur dengan :
 - (1) Memimpin dari belakang;
 - (2) Mengarahkan sikap mandiri.
- 2. **Peranserta Masyarakat**, adalah suatu bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan SLTP, dengan indikatornya :
 - a. Bersifat kerjasama, yang diukur dengan :
 - (1) Keterlibatan dalam perencanaan program;
 - (2) Keterlibatan dalam pelaksanaan program;
 - (3) Keterlibatan dalam pembiayaan.
 - b. Adanya perubahan persepsi, yang diukur dengan :
 - (1) Kewajiban moral untuk membantu pendidikan;
 - (2) Partisipasi atas dasar kesadaran dan bukan paksaan.
 - c. Tumbuhnya sikap toleransi, yang diukur dengan :
 - (1) Penyampaian kritik;
 - (2) Penyampaian gagasan;
 - (3) Penyampaian pikiran alternatif;
 - (4) Saling menghargai.

3. *Pembiayaan Pendidikan di Sekolah*, adalah keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan dan penyusunan anggaran sekolah, dengan indikatornya :
- a. Identifikasi kegiatan, yang diukur dengan :
 - (1) Penyusunan program kurikuler;
 - (2) Penyusunan program ekstrakurikuler.
 - b. Identifikasi sumber-sumber, yang diukur dengan :
 - (1) Sumber anggaran pemerintah;
 - (2) Sumber anggaran masyarakat.
 - c. Pernyataan sumber-sumber, yang diukur dengan :
 - (1) Anggaran Rutin dan Pembangunan;
 - (2) BP3;
 - (3) Donatur.
 - d. Formulasi anggaran, yang diukur dengan :
 - (1) RAPBS;
 - (2) Program insidental.
 - e. Persetujuan yang berwenang, yang diukur dengan :
 - (1) Penyelenggaraan rapat-rapat;
 - (2) Komporomi anggaran.
- 